

LAPORAN MAGANG
DIVISI HAM (HAK ASASI MANUSIA)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR
(KEMENKUMHAM)



DOSEN PEMBIMBING:

Ustadzah Hesti Rokhanyah, M.Pd

DIAJUKAN OLEH:

Arlief Arhevan

402019511013

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS HUMANIORA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2022

SURAT PENGESAHAN LAPORAN MAGANG

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA
TIMUR (KEMENKUMHAM)**

Dipersiapkan dan Ditulis Oleh:



(Arlief Arhevan)

402019511013

Dipertanggung Jawabkan di Depan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Pada Tanggal



Hesti Rokhaniyah, M.Pd.

NIY. 150444

Laporan Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Pembuktian Magang

Ponorogo, 28 November 2022

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Novi Rizka Amalia, M.A.

NIY. 150415

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mahakuasa atas limpah rahmat dan kasih sayangnya. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkn bagi nabi kita nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Kegiatan magang dari Universitas Darussalam Gonntor dilakukan sebagai sarana untuk mengenalkan mahasiswa pada kondisi nyata di lapangan. Proses magang sekaligus menjadi syarat bagi mahasiswa untuk bisa menyelesaikan mata kuliah, tujuan pemilihan lokasi di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur adalah untuk mengetahui permasalahan hukum dan juga hak-hak manusia lebih mendalam. Selama proses magang yang berlangsung pada bulan Agustus 2022, mahasiswa mendapat bimbingan dan arahan dari pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia, mahasiswa berkesempatan untuk terjun langsung dalam menimba ilmu terkain tentang Hak Asasi Manusia. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam proses penulis laporan ini. Sebagai bentuk perbaikan, penulis terbuka pada saran dan masukan.

PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA

DI DAERAH/INSTANSI/PERUSAHAAN/LEMBAGA TEMPAT MAGANG

Nama & NIM :

Nama & Alamat PKN :

.....

.....

Pembimbing Lapangan :

Lama PKN :

NO.	ITEM EVALUASI	NILAI
1.	Etos kerja di lapangan
2.	Pelaksanaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan
3.	Kemampuan bekerja dalam tim
4.	Kemampuan melakukan inisiatif dalam pekerjaan
5.	Kemampuan memberikan ide-ide kreatif
6.	Kehadiran di lokasi magang
TOTAL NILAI		

*Nilai dalam Bentuk angka 1 – 100

.....kota.....,

Pembimbing Lapangan,

TTD & STEMPEL

(..... Nama Terang)
NIP/NRP.

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN LAPORAN MAGANG	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ii
PENILAIAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	iii
DI DAERAH/INSTANSI/PERUSAHAAN/LEMBAGA TEMPAT MAGANG..	iii
FORM PENILAIAN	Error! Bookmark not defined.
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN MAGANG	2
C. WAKTU PELAKSANAAN	3
BAB II.....	4
DESKRIPSI UMUM.....	4
A. SEJARAH SINGKAT INSTANSI	4
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI	5
C. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTANSI	6
D. TATA NILAI	7
1. BerAKHLAK	7
2. Berorientasi Pelayanan	7
3. Akuntabel	8
4. Kompeten	8
5. Harmonis	8
6. Loyal.....	8
7. Adaptif.....	8
8. Kolaboratif.....	9
E. STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI	10
BAB III	11
DESKRIPSI KHUSUS	11
A. PROFIL SINGKAT	11

B. STRUKTUR.....	13
BAB IV	13
HASIL LAPORAN MAGANG	13
A. LAPORAN KEGIATAN HARIAN.....	14
B. MANFAAT KEGIATAN MAGANG	18
C. TIGA PILAR MAGANG.....	19
BAB V.....	21
KESIMPULAN.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementrian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia yang biasa di singkat **KEMENKUMHAM RI** adalah kementiran dan pemerintah Indonesia yang membidangin urusan hukum dan hak asasi manusia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dimana kementrian hukum dan hak asasi manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang). Mahasiswa bagian dari masyarakat hukum diharapkan bisa menjadi ujung tombak untuk memperjuangkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, peran mahasiswa sangat penting demi menjunjung kebersamaan di negeri ini. Maka sangat perlu sekali peran mahasiswa dalam membantu menegakan hukum yang adil.

Selaras dengan berkembangnya isu Hak Asasi Manusia, telah muncul banyak penyelewangan terhadap kemanusiaan terjadi dan terungkap kepublik. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi para pengamat hingga pemangku kebijakan agar kejadian ini tidak terulang Kembali di depannya. Oleh sebab itu, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keahlian terapan yang berguna di berbagai bidang pekerjaan dan berbagai lembaga atau instansi. Kombinasi pengetahuan dalam kelas dan pengetahuan lapangan yang terkait dengan bidang keilmuan yang sedang ditekuni akan membantu mahasiswa dalam pengembangan ilmu dan pengembangan diri serta menyiapkan mereka terjun dalam dunia kerja selepas menyelesaikan pendidikan formal mereka.

Kegiatan magang merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa semester akhir dan merupakan bagian dari penilaian hasil studi mereka untuk menyelesaikan program pendidikan S-1. Kegiatan magang bagi mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional ini merupakan kegiatan angkatan kedua yang dijalankan setelah Program Studi Hubungan Internasional dibuka tahun 2014. Komitmen Program Studi Hubungan Internasional adalah meningkatkan dan menggabungkan bidang keilmuan mahasiswa dan penerapannya didalam dunia kerja. Oleh sebab itu, kegiatan magang ini menunjukkan salah satu bentuk komitmen lembaga perguruan tinggi dalam meningkatkan bidang ilmu mahasiswa dalam upaya pengembangan kualitas hasil *ouput*-nya yang siap terjun di kehidupan dunia kerja yang nyata.

Mengingat pentingnya kegiatan magang ini, maka para mahasiswa ini ditempatkan minimal selama 30 hari kerja di lembaga ataupun instansi pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki relevansi dengan hubungan internasional. Peran lembaga institusi terkait sangat diharapkan dapat memberikan ruang dan tempat bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmunya sekaligus menimba pengalaman baru lewat kegiatan magang ini. tidak hanya itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi instansi yang dituju melalui kompetensi individual yang dimiliki.

B. TUJUAN MAGANG

1. Magang menjadi sarana sebagai peningkatan keilmuan dan pengalaman terhadap dunia kerja.
2. Adanya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap dunia kerja dan isu-isu terkait dengan bidang disiplin ilmu yang ditekuni.
3. Adanya komitmen bersama antara lembaga penyedia sumber daya manusia dan lembaga/instansi penyerap sumber daya manusia dalam meningkatkan konektifitas selanjutnya.
4. Adanya masukan, evaluasi, dan *feedback* dari lembaga atau instansi terkait dengan pengembangan diri mahasiswa dan pengembangan institusi pendidikan.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan magang ini berlangsung dengan kurun waktu 60 hari kerja di tempat lembaga atau instansi yang dituju dengan jadwal sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Pekan Per bulan																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	proposal masuk lembaga / Instansi																				
2	Pembekalan Mahasiswa																				
3	Survei dan Sosialisasi dari Lembaga																				
4	Pelaksanaan Magang																				
5	Monitoring dan Evaluasi																				
6	Penarikan Magang																				
7	Laporan																				

BAB II

DESKRIPSI UMUM

A. SEJARAH SINGKAT INSTANSI



Gambar 2.1 logo Kumham Jatim

Kantor wilayah kementerian hukum dan Hak asasi manusia Jawa Timur yang berada di jalan Kayon No50-52 Surabaya. Dimana kantor wilayah dibentuk tahun 1982, dimana keberadaanya diatur berdasarkan SK menteri kehakiman nomor M.01.03.TR.07.10 tahun 1982.¹ yang diperbaharui dengan SK menteri kehakiman Nomor M-03. TR-07. 10 tahun 1992. Saat ini kantor wilayah merupakan integrasi dari seluruh jajaran pemasyarakatan, keimigrasian, BHP dan lembaga peradilan umum yang berada pada propinsi Jawa timur.

Pada akhir tahun 2003 lembaga peradilan umum harus berpisah dengan kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada awalnya masih bernama Departemen Kehakiman RI akan tetapi keluarnya UU No. 35 tahun 1999.² tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan dengan tegas bahwa dimana lingkungan peradilan umum dikeluarkan dari Departemen

¹ Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia," 1992, https://kanibatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/m.03-pr_.07_.10_tahun_1992_.pdf.

² Republik Indonesia, "PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN" (Indonesia, 1999), file:///C:/Users/ASUS/Downloads/UU Nomor 35 Tahun 1999.pdf.

Kehakiman RI ke Mahkamah Agung RI dengan masa transisi paling lama 5 (lima) tahun (lebih kurang tahun 2003 sudah selesai).

Perubahan Nomenklatur/Tata Nama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dari masa kemasa :

1. Tahun 1982 – 2000 bernama Kanwil Departemen Kehakiman Jawa Timur
2. Tahun 2000 bernama Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan Jawa Timur
3. Tahun 2000 – 2004 bernama Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur
4. Tahun 2004 – 2009 bernama Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Timur
5. Tahun 2009 – sampai sekarang bernama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Pengembangan organisasi dan kelembagaan terus dilakukan hingga pada tahun 2005 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan peraturan menteri Nomor M. 01. PR. 07.10 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, yang mana salah satu perubahannya adalah bertambahnya satu Divisi yaitu Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam rangka melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah dibidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan terkait. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terdiri dari 4 (empat) divisi yakni Divisi Administrasi, Divisi Pemasarakatan, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dalam HAM sendiri terdiri dari satuan kerja yaitu BHP (Balai Harta Peninggalan Negara)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi

berdasarkan kebijakan Menteri dan Ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan tugas yang dimaksud diatas Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:³

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

C. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTANSI

VISI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

³ Kemenkumham, “Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jatim,” Kemenkumham, n.d., <https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>.

MISI

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan Nasional.
2. Menyelenggarakan pelayanan Publik di Bidang Hukum yang berkualitas.
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Masyarakat yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat;
7. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat;

D. TATA NILAI

1. BerAKHLAK

Sejak 27 Juli 2021 silam, Kementerian PAN-RB meluncurkan core values dan employer branding baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, **BerAKHLAK** dikenalkan sebagai core values ASN seluruh Indonesia dan *#banggamelayanibangsa* sebagai employer branding ASN.

BerAKHLAK merupakan akronim dari **Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif**. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan *#banggamelayanibangsa* merupakan employer branding ASN zaman now yang melayani sepenuh hati.

2. Berorientasi Pelayanan

- a) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.

- c) Melakukan perbaikan tiada henti.

3. Akuntabel

- a) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- b) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- c) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

4. Kompeten

- a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b) Membantu orang lain belajar.
- c) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

5. Harmonis

- a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b) Suka menolong orang lain.
- c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

6. Loyal

- a) Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- c) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

7. Adaptif

- a) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- b) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- c) Bertindak proaktif.

8. Kolaboratif

- a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

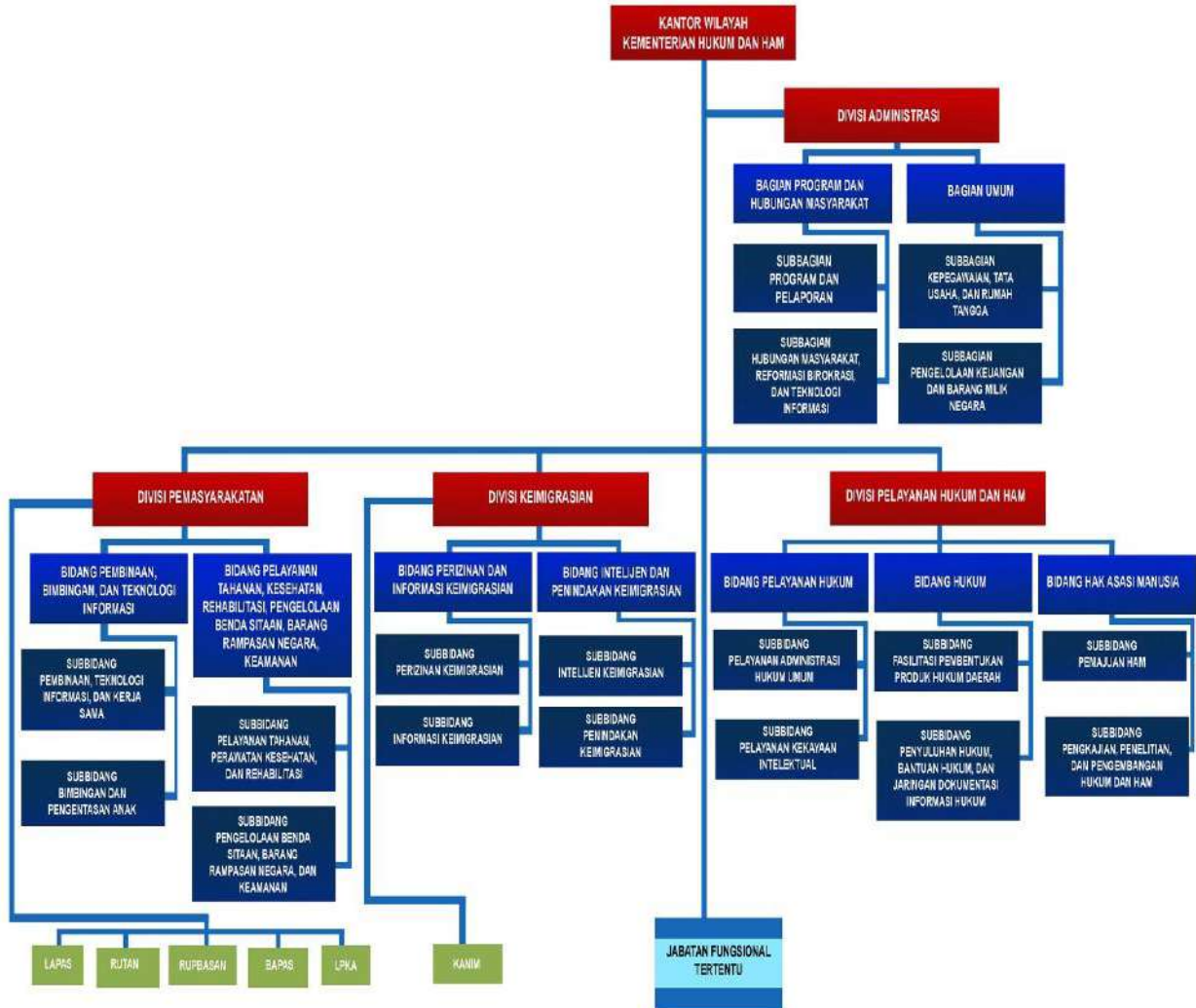
PASTI

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya juga telah memiliki dan menjunjung tinggi tata nilai kami *PASTI*, yang berarti:

1. **Profesional:** Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. **Akuntabel:** Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi:** Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. **Transparan:** Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif:** Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI

Adapun Struktur organisasi KEMNKUMHAM Jawa Timur adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur organisasi instansi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur

BAB III

DESKRIPSI KHUSUS

A. PROFIL SINGKAT



Gambar 3.1 Kantor Kemenkumham Jawa Timur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576. Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan

departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D. Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D. Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman.

Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu. Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha

Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka. Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

B. STRUKTUR

Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pelayanan Hukum Dan HAM

A. LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Progres dan aktifitas penulis selama dua bulan program magang berlangsung, sepenuhnya dibawah pengawasan ketua divisi HAM. Hal ini dikarenakan ada banyak tugas, kegiatan, dan berita bersifat rahasia yang tidak boleh dikerjakan tanpa perintah penuh dari ketua divisi HAM. Beberapa kegiatan harian yang biasa dilakukan tanpa menunggu instruksi dari ketua divisi HAM hanyalah menyusun laporan kasus HAM, menulis kasus pelanggaran HAM yang baru, dan mendampingi ketua divisi HAM dalam menyelesaikan masalah HAM. Adapun kegiatan selama program magang berlangsung penulis melampirkan sebagai berikut :

Minggu : Pertama		Bulan/Tahun : Juli / 2022	
No	Hari/ Tanggal	Keterangan	Tempat
1.	Kamis 18 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti Apel Pagi Perkenalan dan diskusi pengenalan terkait divisi HAM kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Jawa Timur 	1.Kantor Divisi HAM
2.	Jum'at 19 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Mempelajari berkas matriks kasus HAM yang terekam sejak awal tahun 2022 	1.Kantor Divisi HAM
3.	Senin 22 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti Apel Pagi Mendapatkan tugas dari kepala bidang HAM mengurutkan berkas aduan komunikasi masyarakat Menginput berkas laporan kasus HAM kedalam matriks. 	1.Kantor Divisi HAM
4.	Selasa 23 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti Apel Pagi Melanjutkan penginputan berkas laporan kasus HAM Merapihkan berkas laporan pengaduan dan menyerahkan ke kepala bidang HAM Telah mengikuti FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) terkait kasus tanah hijau kota Surabaya. 	1.Kantor Divisi HAM
5.	Rabu 24 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti Apel Pagi Merevisi hasil kerja pemberkasan kasus komunikasi masyarakat dan mencari berkas kasus yang terlewatkan 	1.Kantor Divisi HAM
6.	Kamis 25 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti Apel Pagi Merapihkan berkas pengaduan yang ada di Google Drive 	1.Kantor Divisi HAM
7.	Jum'at 26 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> Membantu merapihkan berkas dari staf bagian pelayanan penyuluhan hukum 	1.Kantor Divisi HAM

Minggu : Kedua		Bulan / Tahun : Agustus, September / 2022	
No	Hari / Tanggal	Keterangan	Tempat
1.	Senin, 29 Agustus 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Membantu membuat slide presentasi terkait capaian aksi HAM pemerintah daerah dan sosialisasi permenkumham terbaru	1.Kantor Divisi HAM
2.	Selasa, 30 Agustus 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Membantu Staf bagian administrasi HAM untuk mendistribusikan surat undangan FGD ke : 3. BPN Jatim 4. BPN Kota Surabaya 5. DPRD Kota Surabaya 6. Balai Kota SBY	1.Kantor Divisi HAM 2.BPN Jatim 3.BPN Kota Surabaya 4.Kantor DPRD Kota Surabaya 5.Balai Kota Surabaya
3.	Rabu, 31 Agustus 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Merapihkan berkas HAM	1.Kantor Divisi HAM
4.	Kamis, 1 September 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengikuti “Diseminasi pelayanan publik berbasis hak asasi manusia menuju pelayanan public inklusif”	1.Kantor Divisi HAM
5.	Jum'at, 2 September 2022	1. Mengikuti penyuluhan dan sosialisasi bantuan hukum dan HAM	1.Kantor Divisi HAM

Minggu : Ketiga		Bulan / Tahun : September 2022	
No	Hari / Tanggal	Keterangan	Tempat
1.	Senin, 5 September 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mempelajari matriks kasus pengaduan HAM	1.Kantor Divisi HAM
2.	Selasa, 6 September 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mendampingi rapat lanjutan kasus tanah hijau Kota Surabaya	1.Kantor Divisi HAM
3.	Rabu, 7 September 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mempelajari konsep <i>bullying</i> beserta contoh-contohnya 3. Membuat slide presentasi terkait sosialisasi pencegahan <i>bullying</i>	1.Kantor Divisi HAM
4.	Kamis, 8 September 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Menyelesaikan slide tentang <i>bullying</i>	1.Kantor Divisi HAM
5.	Jum'at, 9 September 2022	1. Menyelesaikan slide tentang <i>bullying</i>	1.Kantor Divisi HAM

Minggu : Keempat		Bulan / Tahun : September 2022	
No	Hari / tanggal	Keterangan	Tempat
1.	Senin, 12 September 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengikuti kajian masjid 3. Merapihkan data	1.Kantor Divisi HAM
2.	Selasa, 13 Setember 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengikuti kajian masjid	1.Kantor Divisi HAM
3.	Rabu, 14 Septmber 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengikuti kajian masjid 3. Merapihkan data-data	1.Kantor Divisi HAM
4.	Kamis, 15 September 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengikuti kajian masjid	1.Kantor Divisi HAM
5.	Jum'at, 16 September 2022	1. Mendampingi ibu Kepala Divisi HAM dalam acara " <i>Global chain and Sustanaible supply chains: capacity and connectivity</i> " dalam sesi "BHR (Bussines and Human Rights)"	1.Hotel Majapahit Surabaya

Minggu : Kelima		Bulan / Tahun : September 2022	
No	Hari / Tanggal	Keterangan	Tempat
1.	Senin, 19 September 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengikuti Perjalanan Dinas ke Kab. Pamekasan	1.Kantor Divisi HAM
2.	Selasa, 20-27 September 2022	pada hari ini saya memohon izin kepada kepala bidang HAM untuk izin pulang kerumah dikarenakan ada permasalahan keluarga yang harus diselesaikan	

Minggu : Keenam		Bulan / Tahun : September 2022	
No	Hari / Tanggal	Keterangan	Tempat
3.	Rabu, 28 September 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Membaca kembali matriks berkas pengaduan layanan komunikasi masyarakat	1.Kantor Divisi HAM
4.	Kamis, 29 Sepember 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengikuti kajian masjid	1.Kantor Divisi HAM
5.	Jumat, 30 September 2022	3. Membuat slide presentasi hasil nilai capaian aksi ham seluruh kabupaten-kota jawa timur	1.Kantor Divisi HAM

Minggu : Ketujuh		Bulan / Tahun : Oktober 2022	
No	Hari / Tanggal	Keterangan	Tempat
1.	Senin, 3 Oktober 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Melanjutkan membuat slide presentasi hasil nilai capaian aksi ham seluruh kabupaten-kota jawa timur	1.Kantor Divisi HAM
2.	Selasa, 4 Oktober 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengikuti <i>Focus Group Discussion</i> “legalisasi tanda tangan dan implementasi system legalisasi apostille”	1.Kantor Divisi HAM 2.Ruang rapat hotel Grand Mercure Surabaya
3.	Rabu, 5 Oktober 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengikuti kajian	1.Kantor Divisi HAM
4.	Kamis, 6 Oktober 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Memperbarui berkas matriks pelayanan komunikasi masyarakat (<i>soft file</i>)	1.Kantor Divisi HAM
5.	Jumat, 7 Oktober 2022	1. Memperbarui, dan menata berkas fisik terbaru pelayanan komunikasi masyarakat, serta menurutkannya sesuai nomor.	1.Kantor Divisi HAM

Minggu : Ketujuh		Bulan / Tahun : Oktober 2022	
No	Hari / Tanggal	Keterangan	Tempat
1.	Senin, 10 Oktober 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 3. Membantu staf bagian pelayanan hukum dalam mencari referansi studi pustaka (jurnal hukum)	1.Kantor Divisi HAM
2.	Selasa, 11 Oktober 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 3. Mengikuti diskusi non-formal dengan kepala bagian HAM dengan topik “kekerasan dalam rumah tangga”	1.Kantor Divisi HAM 2.Ruang rapat hotel Grand Mercure Surabaya
3.	Rabu, 12 Oktober 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengikuti kajian masjid	1.Kantor Divisi HAM
4.	Kamis, 13 Oktober 2022	1. Mengikuti Apel Pagi 3. Menghantar Surat ke TNI AL untuk memberikan kasus Veteran	1.Kantor Divisi HAM 2. Kantor TNI AL
5.	Juamt, 14 Oktober 2022	1. Membuat undangan dan alamat-alamat	1.Kantor Divisi HAM

Minggu : Kedelapan		Bulan / Tahun : Oktober 2022	
No	Hari / Tanggal	Keterangan	Tempat
1.	Senin, 17 Oktober 2022	1. Mengikuti apel pagi 2. Membuat undangan	1.Kantor Divisi HAM
2.	Selasa, 18 Oktober 2022	1. Mengikuti apel pagi 2. Mengirim undangan ke seluruh PT yang ada di Surabaya	1.Kantor Divisi HAM 2.kisaran Surabaya

3.	Rabu, 19 Oktober 2022	1. Mengikuti apel pagi 2. Merapihkan berkas 3. Mengikuti kajian	1.Kantor Divisi HAM
4.	Kamis, 20 Oktober 2022	1. Mengikuti apel pagi 2. Mengirim undangan ke daerah dinas	1.Kantor Divisi HAM 2. Daerah Surabaya
5.	Juamt, 21 Oktober 2022	1. Mengikuti jalan bersama 2. Mengirim surat 3. Kumpul perpisahan	1.Kantor Divisi HAM 2. Daerah Surabaya

B. MANFAAT KEGIATAN MAGANG

Adapun manfaat yang didapat dari kegiatan program magang di Kanwil Kemenkumham Surabaya ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa:

- a. Memberikan pengetahuan tentang seputar isu-isu mengenai hak- asasi manusia dan keamanan
- b. Sebagai pengalaman kerja awal bagi mahasiswa sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang nyata dan wadah untuk menjalin kerjasama yang baik antar lembaga pendidikan dengan pihak instansi yang terkait.
- c. Mahasiswa mampu melihat hubungan antara dunia kerja dan dunia pendidikan.
- d. Mahasiswa dapat memperluas jaringan hubungan pertemanan bersama rekan kerja dengan baik

2. Bagi Instansi Magang dan Instansi Pendidikan:

- a. Sebagai sarana kerjasama antara Universitas Darussalam Gontor dan lembaga atau instansi yang bersangkutan.
- b. Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial.
- c. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di Universitas Darussalam gontor
- d. Adanya kontribusi pemikiran dan hasil kerja positif bagi lembaga atau instansi yang bersangkutan.
- e. Bisa dijadikan sarana penyaringan dan observasi kemampuan serta kompetensi mahasiswa.

C. TIGA PILAR MAGANG

1. *Capacity Building*

Dalam sebuah organisasi dapat berkembang dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi, dalam pembangunan kapasitas (*capacity building*) menjadi hal yang mutlak harus berjalan dengan baik. Secara umum, *capacity building* dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*). Di lingkungan Kanwil Kemenkumham Surabaya penulis mempelajari keterampilan yaitu caranya memahami hukum-hukum yang ada serta keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan, sikap penulis dengan rekan-rekan kerja memberikan sifat yang baik dan ramah sesuai pendidikan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Universitas Darussalam Gontor, perilaku penulis terhadap staf dan teman-teman magang memberikan sikap yang baik dan ramah.

A. *Skill*

Selama pelaksanaan magang, penulis dituntut untuk selalu berfikir kritis baik dalam berpendapat atau menerima masukan dari orang lain. Seperti saat melakukan analisis Hak-hak manusia dan Hukum penulis berdiskusi dengan para staf ahli dalam bidang hak asasi dan hukum untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi di Surabaya. Penulis mendapatkan perspektif yang berbeda dari teman magang dan staf divisi HAM dan hukum dalam melihat suatu masalah sehingga menambah wawasan baru untuk penulis sendiri.

B. *Attitude*

Selama pelaksanaan magang, penulis berkomunikasi dengan rekan kerja atau kepala setiap divisi tempat magang menggunakan nada dan gaya bicara yang baik adalah sebuah sikap yang baik dalam berkomunikasi, serta penulis ketika bersosialisasi, penulis memperhatikan batasan dan menjaga hubungan orang lain tetap profesional ketika di waktu kerja

C. *Behaviour*

Selama penulis melakukan magang penulis selalu berusaha tepat waktu untuk menunjukkan antusiasme dan determinasi untuk bekerja, yang akan menjadi nilai plus dimata perusahaan tak hanya tepat waktu, selama magang penulis berusaha untuk tidak selalu membuka *handphone* ketika sedang bekerja atau berkominikasi dengan staf maupun atasan.

2. *Corporate Promotion*

Promosi instansi adalah promosi untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap suatu instansi atau perusahaan. Penulis dalam hal ini selama melaksanakan magang di Kanwil Kemenkumham Surabaya, penulis seringkali memberi penjelasan dan pengenalan terkait UNIDA Gontor sebagai Universitas bersistem pesantren kepada jajaran pegawai maupun kepada sesama mahasiswa magang Kanwil Kemenkumham Surabaya serta keunikan yang dimiliki dari sistem pesantren yang diterapkan oleh UNIDA Gontor, dimana sistem pesantren yang mendukung kehidupan yang teratur dan terjaga mendapat tanggapan yang positif dari warga Kanwil Kemenkumham Surabaya. Terlebih bagi para orang tua yang akan melanjutkan studi anak-anak mereka ke perguruan tinggi, UNIDA Gontor dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menjaga moral dan akhlak yang dapat membentuk manusia yang berkarakter.

3. *Community Empowerment*

Didalam Kanwil Kemenkumham Surabaya juga berupaya untuk berkontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui banyak cara. Misalkan, dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk memberi tahu kepada masyarakat mengenai hak-hak bagi setiap individu dan mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum serta budaya hukum, agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hukum yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN

Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa bagi penulis dapatkan selama kurun waktu 60 hari melaksanakan magang di Kanwil Kemnkumham Jawa Timur. Penulis mendapat banyak pengalaman terkait bagaimana suasana didalam dunia kerja yang sesungguhnya, serta ilmu, wawasan, serta keterampilan baru yang nantinya juga akan bermanfaat saat memulai karir dalam dunia kerja. Selama perjalanan magang berlangsung penulis jadi banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dilingkupan Hak asasi manusia serta mengetahui peranan penting dalam Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi serta penulis juga banyak mengetahui permasalahan tentang hukum serta HAM yang ada di Jawa Timur. Dimana khususnya di daerah Surabaya masih terdapat permasalahan seperti sengketa tanah yang masih belum jelas sehingga permasalahan ini masih terus berlangsung. Selain itu juga masih banyak permasalahan seperti hak asu anak, permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan untuk kalangan disabilitas. Permasalahan ini pula kami pelajari dan kami pahami selama magang berlangsung. Tidak hanya itu penulis juga belajar komonikasi serta menjalin relasi kepada staf khususnya di divisi HAM yang mana nanti nya penulis berharap bisa bekerja bersama rekan rekan staf yang ada di divisi HAM. Tidak hanya itu penulis juga menjalin komonikasi baik dengan rekan-rekan magang yang ada di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkumham. “Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM
Jatim.” Kemenkumham, n.d.
<https://jatim.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>.
- Republik Indonesia. “Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia,” 1992.
[https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/m.03-
pr_.07_.10_tahun_1992_.pdf](https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/assets/resources/files/m.03-pr_.07_.10_tahun_1992_.pdf).
- . “PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN
1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN
KEHAKIMAN.” Indonesia, 1999. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/UU
Nomor 35 Tahun 1999.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/UU%20Nomor%2035%20Tahun%201999.pdf).

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1: Pengarahan magang oleh Kepala Divisi HAM



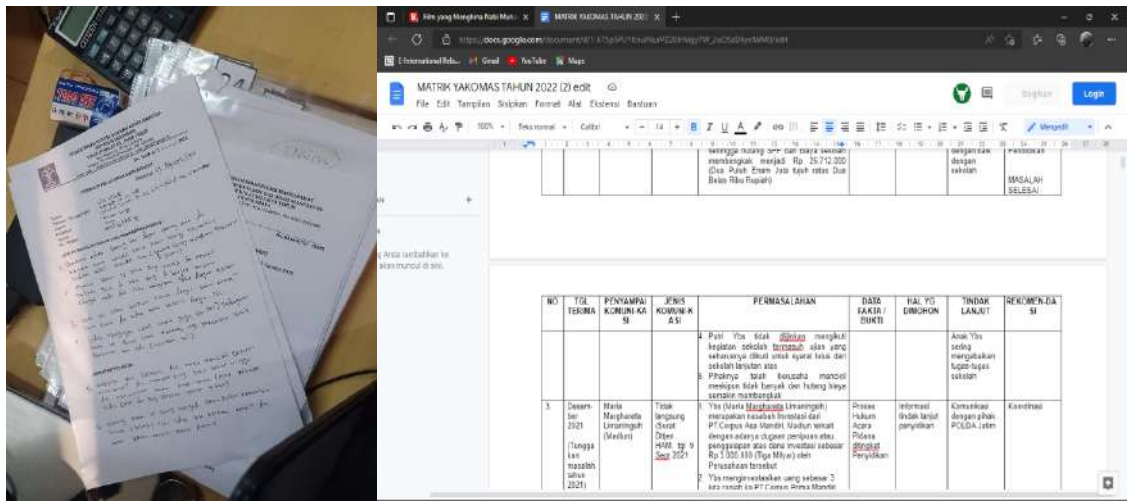
Lampiran 2: Upacara Pagi



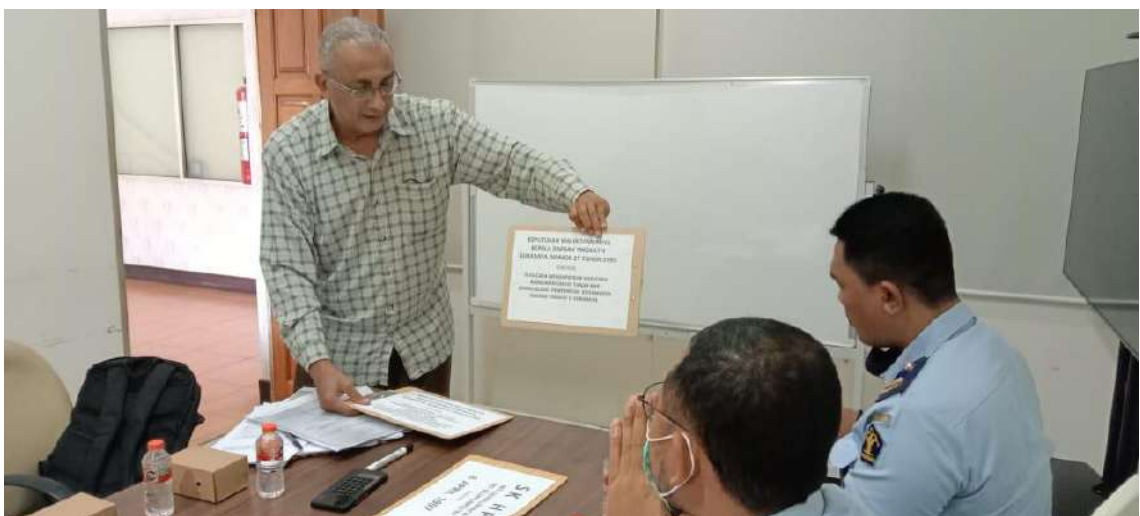
Lampiran 3: Pengarahan setiap Divisi yang ada di Kanwil Kemenkumham Jatim



Lampiran 4: Perapihan data-data Matrik Yakomas Kemenkumham



Lampiran 5: Rapat mengenai surat hijau



Lampiran 6: Rapat mengenai rancangan kitab Undang-undang hukum pidana



Lampiran 7: Mengirim surat undangan kepada pimpinan angkatan laut mengenai masalah veteran



Lampiran 8: Kajian rutin setelah sholat dzhur



Lampiran 9: Sosialisasi mengenai Business and Human Rights



Lampiran 10: Sosialisasi legalisasi tanda tangan dan implementasi sistem legalisasi Apostille



Lampiran 11: Demo warga asing untuk diberikan Hak kesejahteraan



Lampiran 12: Merapikan undangan dan mengirim undangan untuk sosialisasi
Kepemilikan



Lampiran 13: Jalan bersama memperingatin G20



Lampiran 14: Sosialisasi penutupan magang



Lampiran 15: Surat keterangan magang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496
Laman: <http://katm.kemerkumham.go.id> suret: tukkamwilatim@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : W.15-UM.01.01-4786

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Priambodo Adi Wibowo, S.H., M.H.
NIP : 196312142008011001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah
Tangga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Timur,

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arlef Arhevan
NRP : 402019511013
Program Studi : Hubungan Internasional

telah melaksanakan Magang pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2022 s.d.
23 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Surabaya, 24 Oktober 2022,
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Subbagian Kepegawaian,
Tata Usaha dan Rumah Tangga,



Priambodo Adi Wibowo
NIP 196312142008011001